

**PENERAPAN SANKSI OLEH PEJABAT DAERAH KOTA TEBING
TINGGI TERHADAP PNS YANG TELAH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Januar Nur Arrizal Saifullah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.
2. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang sanksi administratif yang dapat diberikan kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat melakukan tindak pidana korupsi, namun PNS tersebut masih tercatat sebagai PNS dan masih menerima gaji dari negara. Penerapan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin PNS belum berjalan dengan baik. Oknum PNS yang telah dipidana penjara selama 5 tahun lebih tersebut seharusnya sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dibacakan, karena PNS tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 87 UU ASN, Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, dan Pasal 9 PP No. 19 Tahun 2013, serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.

Kata kunci : Tindak pidana korupsi, PNS, sanksi administratif.

**IMPLEMENTATION OF SANCTIONS BY LOCAL CIVIL SERVANTS
TEBING TINGGI ON CIVIL SERVANTS THAT HAVE BEEN
CONDUCTING CORRUPTION CRIMINAL ACTS**

Januar Nur Arrizal Saifullah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.
2. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

ABSTRACT

This study aims to find out more about administrative sanctions that can be given to civil servant who have been sentenced to imprisonment based on court decisions that have permanent legal power due to criminal acts of corruption, but the civil servants are still registered as civil servants and still receive salaries from the state. The application of disciplinary sanctions against civil servants who violate the discipline of civil servants has not gone well. The civil servant who has been sentenced to prison for more than 5 years should have been dishonourably discharged from the civil servant since the decision that has permanent legal force was read, because the civil servant violated the statutory provisions namely Article 87 of the ASN Law, Article 250 Government regulation number 11 of 2017, and article 9 Government regulation number 19 of 2013, as well as Article 8 of Government regulation number 4 of 1996 concerning Dismissal/Temporary dismissal of civil servants.

Keywords : Corruption, Civil Servants, Administrative sanctions.